

## Sistem E-Budgeting Dalam Meningkatkan Akuntabilitas: Perspektif Maqashid Syari'ah

Septrita Sutriyani<sup>1</sup>, Kamilah, K<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>1</sup>sseptrita69@gmail.com, <sup>2</sup>kamila@uinsu.ac.id

### ABSTRACT

*E-Budgeting is a plan that is methodically prepared and includes movements of every type, communicated within the related financial unit, and substantial for a certain period of time at a later date. The system can shorten the expected time for the rule-making process, because it is done on the web and can be obtained anywhere. The implementation of the local government system as far as e-budgeting is from the underlying plan, the implementation has gone through a few changes and advancement advance, but is exceptionally much required: human assets who handle e-budgeting. The reason behind this inquire about is to discover out how the execution of E-Budgeting within the Territorial Secretariat of Binjai City and to see whether the application of E-Budgeting can construct Responsibility inside the Territorial Secretariat of Binjai City. In expansion, this research was conducted employing a subjective clear investigation. The results of using the E-Budgeting system can shorten preparation time and costs are not expensive because they are coordinated with each other from preparation, planning to announcements. With the E-Budgeting system, the decision-making process related to budgeting becomes faster. The use of the E-Budgeting system is also able to simplify the flow of budgeting, encourage time savings in budgeting and there is cost efficiency in the budgeting process. The implementation of the E-Budgeting system in increasing the value of accountability in the Regional Secretariat Office of the Binjai City Legal Division has been very well achieved.*

**Keywords :** *E-Budgeting, accountability, the regional Secretariat, maqashid sharia perspective*

### ABSTRAK

E-Budgeting adalah rencana yang secara metodelis siap dan mencakup pergerakan dari setiap jenis, dikomunikasikan dalam unit terkait keuangan, dan substansial untuk jangka waktu tertentu di kemudian hari. Kerangka tersebut dapat mempersingkat waktu yang diharapkan untuk pegangan pembuatan aturan, karena dilakukan secara online dan dapat diperoleh di mana saja. Pelaksanaan kerangka kerja pemerintah terdekat sejauh e-budgeting adalah dari pengaturan dasar, pelaksanaannya telah melalui beberapa perubahan dan kemajuan, tetapi sangat dibutuhkan: sumber daya manusia yang menangani e-budgeting. Alasan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan E-Budgeting di lingkungan Sekretariat Wilayah Kota Binjai dan untuk melihat apakah penerapan E-Budgeting dapat membangun Tanggung Jawab di lingkungan Sekretariat Wilayah Kota Binjai. Selanjutnya, pertanyaan ini dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan subjektif yang jelas. Adanya penggunaan kerangka E-Budgeting dapat mempersingkat waktu penyusunan dan biaya yang wajar karena saling dipermudah mulai dari perencanaan, penyusunan hingga pelaksanaan pengumuman. Dengan adanya system E-Budgeting proses pengambilan

keputusan yang berkaitan dengan penyusunan anggaran menjadi lebih cepat. Penggunaan system E-Budgeting juga mampu menyederhanakan alur dalam pembuatan anggaran, mendorong penghematan waktu dalam penyusunan anggaran dan terdapat efisiensi biaya dalam proses penyusunan anggaran. Penerapan system E-Budgeting dalam meningkatkan nilai akuntabilitas di Kantor Sekretariat Daerah Kota Binjai Bagian Hukum telah tercapai dengan sangat baik.

**Kata Kunci** : E-Budgeting, Akuntabilitas, Sekretariat Daerah, Perspektif Maqashid Syariah

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Sistem e-Budgeting pertama kali dijalankan oleh Pemerintah Daerah Surabaya. Beberapa kepala daerah provinsi serta pemerintah pusat berinisiatif menjalankan sistem kerja dikenal dengan penggunaan kata e-Budgeting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (APBN). Setelah Pemerintah daerah Surabaya menjalankan e-budgeting, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan penerapan e-budgeting.

Sistem e-Budgeting (perencanaan elektronik) yang diterapkan dalam penyusunan RAPBD DKI Jakarta, merupakan perangkat untuk penyusunan RAPBD DKI. Pada tingkat dasar, ada contoh input rencana pengeluaran. Dimana pada umumnya penyusunan RAPBD DKI Jakarta dibuat secara fisik menggunakan Microsoft Excel, dengan e-budgeting, informasinya juga elektronik atau di web, dan menggunakan sistem keamanan dengan kunci rahasia. Sistem e-budgeting diterapkan seperti aplikasi dalam perdagangan internet.

Bagaimanapun, e-budgeting tidak berjalan dengan sempurna tergantung pada situasinya, bahkan e-Budgeting menimbulkan beberapa masalah baru. DKI Jakarta dihebohkan dengan kericuhan antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta terkait kesiapan APBD DKI Jakarta 2015. Pada tahun 2018 sistem E-budgeting dijalankan oleh Pemerintah Daerah Binjai.

Kerinduan pemerintah dalam melaksanakan e-Budgeting adalah untuk kesejahteraan individu dan menutup celah antara kemerosotan dan pemborosan anggaran. Komitmen pemerintah lingkungan sangat penting untuk melaksanakan e-Budgeting. Dalam ekspansi ke pemerintah terdekat, hal

lain yang terlalu menghambat pelaksanaan e-Budgeting terkait dengan inovasi dan aset manusia. Pemerintah Indonesia saat ini sedang berupaya untuk membuat langkah dana teritorial dalam hal keterusterangan terkait dengan bentuk, pengajaran, dan data yang dapat diperoleh secara khusus oleh pihak terbuka atau pihak terkait. Pemerintah juga berusaha lebih responsif yang menyarankan cara melayani mitra penting dengan lebih baik. Masalah pertanggungjawaban terhadap anggaran pemerintah daerah sekitar yang seringkali berujung pada persoalan legitimasi tidak dapat dihindarkan karena sering terjadi penyelewengan rencana anggaran dari awal pelaksanaan RAPBN hingga menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Menurut peneliti sebelumnya (Nasution & Atika, 2019) *tidak ada dampak Pelaksanaan E-Budgeting dalam meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi, hal ini dikarenakan pelaksanaan E-Budgeting di Pemerintah daerah Binjai baru berjalan 1 (satu) tahun sehingga besaran dampaknya belum bisa dievaluasi dengan baik dan ini dijelaskan oleh efek samping dari hubungan antara E-budgeting dalam memperluas tanggung jawab dan keterusterangan juga bernilai rendah. Juga, sebelum pemanfaatan e-budgeting, Pemerintah daerah Binjai. Selanjutnya, analisis dibangkitkan untuk memimpin penelitian tentang pelaksanaan sistem e-budgeting dalam memperluas nilai akuntabilitas.*

Menurut (Amiruddin, 2016) *Perkembangan sistem pemerintah daerah yang terjadi di Indonesia saat ini memerlukan struktur penalaran lain dalam organisasi pemerintahan, lebih spesifiknya struktur sistem pemerintahan yang diyakini mendorong "Good Governance". Penugasan pemerintah daerah untuk membuat 'good governance' diharapkan mulai menyebarluaskan komponen penerimaan, keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi. Salah satu bagian atau pondasi dalam suatu kantor pemerintahan yang dipercayakan untuk memahami suatu jenis keterbukaan, transparan dan keterbukaan adalah bidang hubungan masyarakat.*

E-budgeting adalah system informasi yang digunakan untuk menyiapkan rencana pengeluaran untuk membangun produktivitas dan kelangsungan hidup dalam sistem perencanaan. Sistem e-budgeting mengasumsikan bagian penting dalam perencanaan. Sistem kerja ini dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan dalam sistem perencanaan, karena dilakukan secara online dan dapat diperoleh dimana saja. Sistem

kerja ini juga berfungsi sebagai instrumen pemeriksaan kerja yang dapat menyaring cara perencanaan yang paling umum. Demikian pula, instrumen untuk e-budgeting juga dapat mengharapkan potensi mark-up dengan kerangka pengamatan yang sama.

Menurut (Khoirul Anwar & Listyorini, 2018) *aplikasi ini merupakan alat untuk mempermudah pengguna dalam mengawasi informasi anggaran pendapatan dan konsumsi. Sistem data base waktu nyata ini dianggap sangat menarik karena dibuat untuk memberikan data yang tepat tentang pengeluaran anggaran yang lebih pasti, sehingga pengguna dapat mengetahui seluk-beluk masing-masing.*

Dengan dibuatnya system e-budgeting ini, Pemerintah Daerah Binjai berkeinginan untuk mempermudah SKPD atau unit kerja dan tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam interaksi kesiapan rencana belanja dan meningkatkan sifat APBD sejauh keselarasan dengan RPJMD, ketepatan pencatatan nilai dan tanggung jawab penggunaan.

E-Budgeting juga sangat penting bagi e-Government sesuai undang-undang yang sepenuhnya bertujuan untuk membantu dan mempermudah pengawasan informasi aturan penyusunan rencana kerja dan pedoman satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD), untuk dimanfaatkan sebagai arsip akomodasi rencana keuangan RKA-SKPD yang sah dan sesuai. sah dengan tujuan dapat menegakkan pilihan administratif dalam penyusunan Rencana Keuangan Penggunaan dan Pendapatan Daerah (APBD) itu sendiri.

Menurut (Prayoga & Yuhertiana, 2021) *Program ini dapat mengikutsertakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sehingga standar-standar administrasi besar dapat dihubungkan dan mempengaruhi pelaksanaan uang terkait pemerintah lingkungan di Indonesia. Administrasi terkait uang besar akan mempengaruhi pelaksanaan pemerintah yang menyajikan atau membuat laporan moneter. Apalagi, semakin membumi penggunaan e-budgeting, diterima bahwa manfaatnya akan jauh lebih baik. sehingga sifat pemerintahan yang ajib, bersih, dan bebas dari kemunafikan, tipu muslihat dan pilih kasih dapat diakui sebagai asumsi bagi individu dan lebih jauh lagi sebagai asumsi bagi negara Indonesia.*

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan system e-Budgeting pada Sekretariat Daerah Kota Binjai.
2. Untuk mengetahui Apakah system E-budgeting dapat meningkatkan nilai akuntabilitas di kantor Sekretariat Daerah Kota Binjai.

### **Tempat Dan Waktu**

Lokasi Penelitian ini bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kota Binjai Bagian Hukum. Penelitian ini dilakukan dari tanggal 17 januari 2022- 17 Februari 2022.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Teori Stewardship**

Stewardship Hypothesis yang dibuat oleh Donaldson dan Davis (1991) adalah pandangan dunia lain untuk mengetahui hubungan antara pemilik dan dewan asosiasi. Dalam berurusan dengan Stewardship Hypothesis, asosiasi berpusat pada harmonisasi antara pemilik modal (standar) dan pengelola modal (stewards) dalam mencapai tujuan bersama. Hipotesis ini menggambarkan apa yang terjadi di mana direktur (eksekutif) dibangkitkan oleh tujuan dari hasil penting mereka untuk membantu asosiasi menolak tujuan individu. Dalam hipotesis ini, dewan sebagai pelayan dibangkitkan untuk bertindak sesuai asumsi untuk kepala. Juga, perilaku penatalayan pada umumnya akan setia pada asosiasi mengingat fakta bahwa penatalayan berusaha untuk mencapai tujuan asosiasi.

Hipotesis kepengurusan mengharapakan bahwa ada hubungan yang kuat antara prestasi otoritatif dan pemenuhan kepala. Penjaga menjaga dan memperluas pemenuhan kepala melalui pameran yang dilakukan. Pengurus yang unggul dalam hal perluasan pelaksanaan sebenarnya ingin memenuhi persekutuan dengan alasan bahwa sebagian besar memiliki kepentingan yang telah dilayani dengan baik melalui ekspansi bisnis yang dijalankan dengan baik. Karena itu, dukungan dari hirarki stewards dibangkitkan untuk memperkuat pelaksanaan kantor, selain memiliki pilihan untuk memberikan pemenuhan kepada daerah.

Menurut (Sholikin & Setiawan, 2018) konsep *stewardship* mengharapakan bahwa manajemen suatu organisasi memperhatikan pemilik untuk menangani kelimpahan yang telah dibagikan dengannya. Pemilik perusahaan bertindak sebagai kepala dan eksekutif sebagai *steward*. Gagasan tentang kualitas manusia yang dapat diandalkan, siap bertindak dan cakap, memiliki kehormatan dan dapat dipercaya menjadi alasan cara berpikir membangun hipotesis kepengurusan untuk kepentingan umum. Hipotesis kepengurusan juga menerima bahwa ada hubungan yang kuat antara kemajuan otoritas dalam menjaga, meningkatkan pelaksanaan hierarkis dan kepentingan pemilik dan pemenuhan pemilik.

### Kerangka Berpikir

Al-Qur'an dan Al-Hadits telah mengungkap bahwa sangat penting untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan Allah, termasuk rencana keuangan elektronik. Terlebih lagi, ada hipotesis keuangan, baik Islami maupun biasa yang mengungkap pentingnya meletakkan kesuksesan normal. Peningkatan bantuan pemerintah diatur dalam regulasi konvensional yang sesuai. Pada sisi lain, kemajuan dunia telah mendorong Indonesia untuk juga fokus pada isu-isu dunia yang sedang dihadapi. Tidaklah fenomenal bagi perbaikan publik untuk fokus pada berita di seluruh dunia. Hal ini cukup menyulitkan bagi rencana keuangan elektronik yang seharusnya dimanfaatkan secara ideal, sebagai pintu terbuka dengan asumsi pemanfaatannya sesuai dengan pedoman yang bersangkutan. Islam menyatakan bahwa semua aturan harus sesuai dengan aturan untuk hal yang baik tentang semua orang, sementara langkah-langkah ini dikemas dalam nilai-nilai maqashid syariah sehingga masuk akal bahwa rencana terkait uang elektronik harus memiliki opsi untuk diambil. komponen kecemerlangan dalam penerapannya. Namun, ada kebutuhan untuk pemeriksaan top-down dari pengaturan dana elektronik. Menerima ujian pemanfaatan maqashid Syariah (Syahputri, 2021). Demonstrasi Penyelidikan Naluri atau Kasfy ini didasarkan pada Hadits Nabi, tepatnya:

وَتَرَدَّدَ لِنَفْسٍ فِي حَاكٍ مَا وَالِإِنَّمُ النَّفْسُ إِلَيْهِ أَطْمَأَنَّتُ مَا أَلْبِرُّ مَرَاتٍ ثَلَاثَ نَفْسِكَ وَاسْتَفْتِ قَلْبَكَ اسْتَفْتِ وَإِبْصَةً يَا وَأَفْتُوكَ النَّاسُ أَفْتَاكَ وَإِنَّ الصَّدْرَ فِي

Terjemahan: "Wahai Wabishah, mintalah fatwa pada hatimu (3x), karena kebaikan adalah yang membuat tenang jiwa dan hatimu. Dan dosa adalah yang membuat bimbang hatimu dan goncang dadamu. Walaupun engkau

meminta fatwa pada orang-orang dan mereka memberimu fatwa.” (HR. Ahmad No. 17545, Al-Albani dalam Shahih At- Targhib No. 1734 mengatakan: “hasan li ghairihi”).

### **E-Budgeting**

Menurut (Sudirman et al., 2020) *Pemanfaatan e-budgeting dapat meringkas siklus yang ada, misalnya menyiapkan informasi biaya satuan standar, berbagi area rencana pengeluaran, benar-benar melihat nasihat tindakan, benar-benar melihat rencana pengeluaran oleh masing-masing unit kerja, begitu juga dalam percakapan dengan DPRD, dan kemudian mencari setidaknya beberapa kali. Dalam amandemen tersebut, dikembangkan pengaturan keuangan yang dapat diketahui oleh semua kalangan dan dapat ditunjukkan arah kemajuannya.*

Menurut (Soleh, 2019) *e-budgeting adalah sistem data penanganan rencana pengeluaran yang dapat diperoleh atau digunakan di mana saja dan kapan saja untuk suatu kepentingan dan terbuka tergantung pada situasi.*

Menurut (Nugraha & Wibowo, 2020) *dapat membantu perencanaan rencana pengeluaran (planning), pembukuan (bookkeeping), hingga pemeriksaan (controlling), serta dampak negatif lainnya yang sering terjadi dalam kerangka pendukung, misalnya mark-up dan pencemaran.*

Secara filosofis, penggunaan e-budgeting sangat penting dalam memahami produktivitas dan efisiensi rencana anggaran daerah. Hanya saja pelaksanaan e-budgeting sangat bergantung pada kemampuan alat dalam menyiapkan pengaturan keuangan untuk kegiatan dan budaya aparatur pemerintah dalam rencana pengeluaran para eksekutif. Pemeliharaan pelaksanaan e-budgeting di masa mendatang juga sangat bergantung pada kebijakan pimpinan.

Meskipun motivasi mendasar di balik pelaksanaan e-budgeting merupakan indikasi diakuinya administrasi besar yang didasarkan pada standar keterusterangan dan tanggung jawab terbuka serta realisasi kepentingan masyarakat, tetapi di kawasan perkotaan tertentu kerangka penganggaran terbuka secara umum tidak dapat dimasukkan secara khusus. Keterbukaan bersama dalam hal apapun dapat mengarahkan

kerangka penganggaran melalui pemerintah terdekat lainnya. Selain itu, hak-hak masyarakat yang luar biasa sebagai penghuni dalam organisasi wilayah terbuka bagaimanapun juga dapat dipenuhi. Penganggaran yang tepat melalui e-budgeting dapat membangun tingkat keingintahuan masyarakat dalam mendukung. Masalah ini karena untuk membatasi masalah yang berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dalam mengamati dan mengendalikan rencana keuangan daerah, pemerintah telah mengambil semacam akuntabilitas dan transparansi data melalui sistem e-budgeting itu sendiri.

E-Budgeting adalah system penyusunan yang menggabungkan pemanfaatan program komputer online untuk bekerja dengan cara yang paling umum untuk menyiapkan rencana pengeluaran provinsi. Dalam sistem ini ada beberapa hal untuk membantu kemajuan e-budgeting antara lain: E-project, E-Delivery, dan E-Controlling. sistem ini dibuat secara online sehingga dapat diakses oleh dinas di mana pun mereka berada, dapat diakses selama pembahasan dengan dewan dan dapat diakses oleh orang-orang pada umumnya untuk mengetahui kinerja pemerintah dan juga penyusunan keuangan daerah.

- E-controlling adalah kerangka kerja kontrol tindakan yang menggabungkan program komputer online untuk mendorong informasi yang berbeda sehubungan dengan penggunaan aktivitas/pekerjaan dan masalah mereka. Cara kerja E-controlling adalah dengan melihat usaha dan kerja sama yang telah disusun oleh SKPD terkait. Hal ini sering dilakukan dengan membantu otoritas teritorial dalam perencanaan anggaran hingga pelaksanaan latihan. Hasil dari persepsi tersebut adalah adanya kesamaan antara penyusunan anggaran yang diusulkan dengan penegasan yang terjadi di lapangan. Yang dimaksud dengan pengakuan adalah pekerjaan (fisik) yang telah dilakukan dan retensi (keuangan). Hasil pemeriksaan dan penilaian yang telah dilakukan, dengan kajian anggaran daerah yang dimotori oleh Kepala Badan Penatausahaan Dana dan Retribusi Daerah, digunakan sebagai bahan renungan untuk membuat langkah-langkah kemajuan daerah dan merencanakan rancangan APBD tahun berikutnya serta sebagai bahan pertimbangan. revisi rencana APBD tahun berjalan. Dari kerangka e-controlling, pemerintah.



- e-Delivery adalah organisasi pengembangan pengaturan yang terus terang yang menggabungkan program komputer online untuk bekerja dengan persyaratan kontrak, tenaga kerja dan pengadaan barang dan pencatatan total. Alasan dari E-Delivery adalah untuk menjamin bahwa penanganan pembuatan kesepakatan dan pemenuhan pencatatan penggunaan anggaran berjalan dengan baik dan menjamin bahwa intelligent run sesuai dengan rencana yang diinginkan. Strategi E-Delivery untuk mengirim toko kerja lebih cepat dan organisasi administratif biasanya dilakukan oleh kantor tenaga kerja untuk memajukan cara umum yang paling umum untuk menyebarkan cadangan. Setelah dispensing, cicilan akan dilakukan melalui e-payment sesuai dengan nomor rekening yang dimasukkan saat melakukan penjualan perdana.

### **Akuntabilitas**

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pedoman tanggung jawab adalah menjalankan yang menunjukkan bahwa setiap perkembangan dan hasil penyelenggaraan negara harus bertanggung jawab kepada daerah/daerah sebagai pemegang kendali negara yang paling utama.

Sesuai dengan petunjuk dan aturan. berlaku. akuntabilitas dapat diartikan sebagai janji untuk mempresentasikan dan melaporkan semua pengembangan dan kegiatan berikutnya dari orang atau perusahaan, khususnya di bidang organisasi moneter kepada pertemuan yang lebih tinggi. Tanggung jawab kepada pemerintah memiliki arti penting kewajiban yang merupakan salah satu kualitas administrasi yang baik. Spekulasi ini muncul dari kemungkinan bahwa manajemen kebijakan merupakan isu menuju pemerintahan yang bersih atau clean government. Tanggung jawab dilihat menurut perspektif pengendalian adalah tindakan dalam pencapaian tujuan.

Permasalahan Akuntabilitas tentang anggaran pemerintah daerah yang secara teratur mengarah pada masalah hukum, ini tidak dapat dihindari karena itu terjadi secara teratur penyalahgunaan pengaturan rencana anggaran dari mulai pelaksanaan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai akhirnya menyusun anggaran Pendapatan dan Konsumsi Teritorial, baik perencanaan di Organisasi Perangkat Teritorial hingga penegasan di tingkat House of Agents. Penggunaan E-Budgeting di rekening Pemda bersifat positif dan ekspansif secara eksplisit sehingga pelaksanaan e-

budgeting dinilai berdampak pada perluasan keterusterangan terkait uang daerah juga.

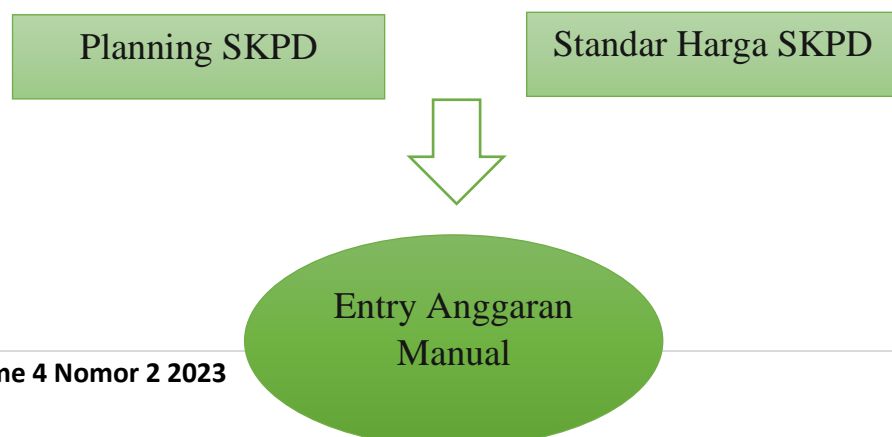
## METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini berupa wawancara langsung dengan beberapa pihak yang menggunakan system E-Budgeting yaitu dengan Ibu Asmara Ningsih selaku Bendahara Kantor Sekretariat Daerah Bagian Hukum dan Ibu Hj. Elfina Sari Harahap S.E selaku Wakil Bendahara Kantor Sekretariat Daerah Bagian Hukum. Peneliti mengumpulkan informasi tentang keadaan secara langsung. Untuk memperoleh informasi secara benar dan tepat, peneliti mencari dan mengumpulkan informasi untuk diolah menjadi data-data penting antara lain:

- a. peneliti melakukan pengamatan langsung ke Kantor Sekretariat Daerah Kota Binjai Bagian Hukum. Bertemu langsung di kantor yang berhubungan dengan penelitian untuk memperoleh informasi dan data penting.
- b. peneliti mencari dari sumber yang berbeda dengan berkonsentrasi pada referensi dari jurnal dan berbagai sumber yang ada. Yang tentunya harus dihubungkan dengan penelitian yang dilakukan.

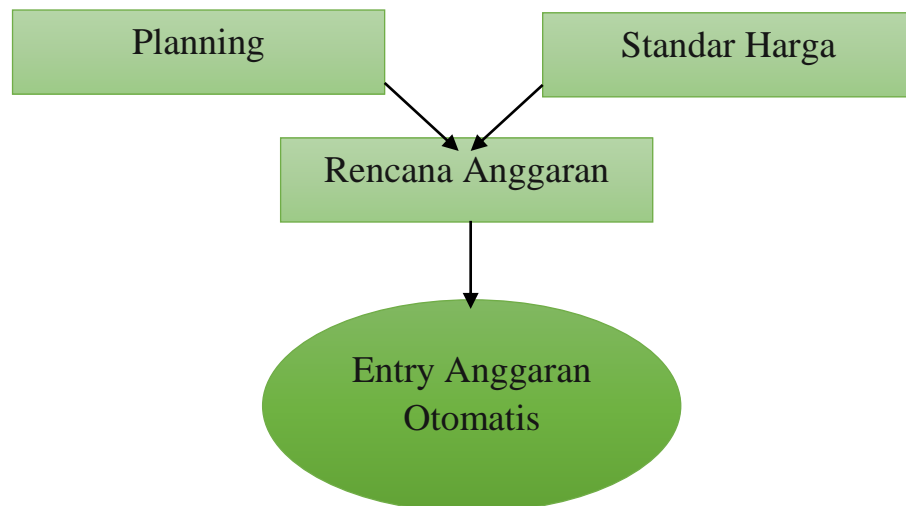
## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sebelum Penerapan E-Budgeting



Sebelum implementasi e-budgeting, pengesahan anggaran dilakukan secara fisik oleh OPD dan setelah itu diserahkan ke Bappeda, sudah ada proposisi penyusunan lima tahun dan proposisi biaya OPD standar. Strategi manual ini mengandung banyak masalah, kesalahan penyampaian informasi dapat terjadi karena salah dan tidak sesuai dengan kode rekening yang dapat diakses di OPD, dan dapat diubah sewaktu-waktu oleh OPD dengan mengajukan pengembalian ke Bappeda.

### Sesudah Penerapan E-Budgeting



Setelah disahkannya e-budgeting, terjadi perbaikan dalam penyusunan dan penetapan prinsip biaya. banyak perubahan dan dampak e-budgeting terhadap keuangan daerah, sehingga berdampak pada tata pemerintahan.

### Implementasi Sistem E-Budgeting di Kantor Sekretariat Daerah Kota Binjai

Implementasi Kebijakan e-budgeting dalam Kantor Sekretariat Daerah Bagian Hukum sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Dimulai dari proses perencanaan, aplikasi serta penilaian. tetapi, Pemanfaatan penganggaran tidak dapat dilakukan secara langsung oleh keterbukaan umum. Bagaimanapun, masyarakat dapat menyaring rencana keuangan dewan melalui situs-situs dari BAPPEDA, PPID, DPRD, BPKAD atau banyak rencana belanja lainnya para eksekutif langsung situs pemerintah. Diyakini bahwa dengan kontrol yang

dilakukan oleh daerah, ketersediaan dan keterbukaan data dalam interaksi rencana keuangan dipercaya dapat tersampaikan.

Pada dasarnya, sistem dibentuk untuk bekerja dengan asosiasi dalam menyelesaikan interaksi aplikasi dari aktivitas lembaganya. Selain itu, untuk tahapan, setiap kerangka kerja itu sendiri harus memiliki opsi untuk diubah dan dibuat sesuai kebutuhan setiap pengguna. Terlebih lagi, sebelum pemanfaatan e-planning, Pemkot Binjai mendapatkan hasil penilaian review yang bagus dari BPK, khususnya 2016, Tidak Layak (WTP) dan 2015 Tidak Memadai (WDP).

*Menurut (Rafiqi et al., 2020) Penilaian siklus dalam pelaksanaannya untuk penggunaan e-budgeting dalam proses pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif. Keadaan dan hasil logis dari pemanfaatan E-budgeting TPAD sangat akomodatif dan mendasar dalam perencanaan SKPD/UKPD menyusun rencana gerakan penyusunan anggaran (RKA) dan dengan e-planning ini kegagalan yang akan terjadi dalam siklus perencanaan APBD dapat dibatasi.*

*Menurut (Khoirunnisak et al., 2017) Pergantian dan kemajuan kerangka kerja, sifat aset manusia, dan kemajuan harus terus diupayakan untuk mewujudkan administrasi yang hebat melalui e-budgeting. Masuk akal untuk menguraikan tata kelola yang sempurna melalui e-budgeting dapat diilustrasikan dengan cara mencapai kemampuan pengambilan dan waktu,*

*kecukupan pelaksanaan, dan keterusterangan dalam pelaksanaannya.*

Hasil dari penilaian evaluasi tersebut menunjukkan bahwa ternyata pelaksanaan e-budgeting di Kantor Setda Bagian Hukum yang sudah berjalan mulai sekitar tahun 2018 dan aktif dengan kemajuan dan kemajuan yang muncul dengan pendekatan dan isu-isu yang muncul, sehingga pada akhirnya dapat memberikan manfaat hingga saat ini. Penilaian terhadap metode pemanfaatannya untuk penggunaan e-budgeting dalam penyelenggaraan anggaran daerah memberikan dampak positif. Karena dampak pemanfaatan e-budgeting TPAD sangat membantu dan mendasar dalam penyusunan Rencana Aksi Anggaran (RKA) SKPD/UKPD dan dengan e-budgeting ini kesalahan yang akan terjadi dalam penyusunan APBD dapat dibatasi. Bagi Dinas Sekretariat Daerah, e-budgeting dapat menjadi langkah awal mengingat dalam penyusunan evaluasi terhadap jalannya tindakan masing-masing SKPD/UKPD, dapat terjadi kegagalan dalam perencanaan. Sekretariat Wilayah Bagian

Hukum mengawasi pelaksanaannya, sehingga siklus pemeriksaan dan penilaian yang terputus-putus dari e-budgeting selesai, dengan alasan bahwa pemeriksaan dan evaluasi dianggap penting untuk kemajuan kerangka tersebut di kemudian hari.

Dalam perencanaan manual, pemerintah menginvestasikan banyak energi, mahal dan memiliki aliran yang sangat panjang sehingga pelaksanaannya tidak mungkin dan berhasil. Sementara itu, dengan adanya perencanaan elektronik dapat menghemat waktu dan biaya pengaturan yang wajar karena difasilitasi satu sama lain dari kesiapan, niat untuk pencacahan.

Saat ini, dengan hadirnya e-budgeting, tingkat kepercayaan masyarakat secara keseluruhan kepada pemerintah di sekitarnya mungkin lebih tinggi. Dalam ekspansi, pemerintah terdekat terlalu mampu untuk komitmen mereka sebagai otoritas teritorial.

### **System E-Budgeting Dapat Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Di Kantor Sekretariat Daerah Kota Binjai**

Penerapan E-budgeting dalam meningkatkan akuntabilitas telah tercapai dengan sangat baik. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan Bendahara dan Wakil Bendahara Kantor Sekretariat Daerah Bagian Hukum yang menerapkan system e-budgeting dalam penulisan anggaran. Dengan adanya system E-Budgeting proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyusunan anggaran menjadi lebih cepat. Penggunaan system E-Budgeting juga mampu menyederhanakan alur dalam pembuatan anggaran, mendorong penghematan waktu dalam penyusunan anggaran dan terdapat efisiensi biaya dalam proses penyusunan anggaran.

Kerangka kerja eksekusi moneter teritorial maju dari waktu ke waktu dan membuat berbagai tantangan di setiap organisasi. Pada tahap awal, hanya pengembangan signifikan yang merupakan tantangan terbesar, tetapi seiring dengan berjalannya kerangka kerja, tantangan lain menjadi lebih kritis: perubahan perilaku, cara membuat, memanfaatkan, dan membuat pilihan, dan cara memantau pelaksanaan kerangka kerja. diri. Pendekatan terhadap perubahan terkait uang lingkungan harus disesuaikan dengan strategi aktualisasi Negara serta pemerintah lingkungan berdasarkan pertemuan perubahan masa lalu atau sebagai respons terhadap perubahan dalam struktur politik atau peraturan yang lebih luas, sehingga tanggung jawab tercapai.

Menurut (Andhayani et al., 2020) *E-budgeting* sangat mendukung jika dilakukan dengan kesiapan dan keinginan semua pihak terkait agar administrasi yang baik dapat berjalan sehingga tanggung jawab, khususnya di bidang dana daerah, dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

## KESIMPULAN

Kantor Sekretariat Daerah Bagian yang hukum telah memanfaatkan e-budgeting dalam penyusunan APBD, namun kerangka tersebut tidak memiliki pilihan untuk langsung dibuka oleh masyarakat yang lebih luas. Dengan organisasi terkait uang umum elektronik, dapat menyingkat waktu perencanaan dan mengurangi biaya karena saling terkoordinasi mulai dari penyusunan, perencanaan hingga pengumuman.

Penerapan system E-Budgeting dalam menaikkan akuntabilitas di kantor Sekretariat Daerah Kota Binjai Bagian Hukum sudah tercapai dengan sangat baik sebab penerapan E-Budgeting sudah berjalan selama sekitar 4 (empat) tahun sehingga ukuran pengaruhnya sudah bisa dievaluasi secara maksimal serta hal tersebut diperjelas dengan hasil korelasi antara E-Budgeting dalam meningkatkan akuntabilitas pula bernilai tinggi.

## Saran

Disarankan agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di lapangan dengan penelitian di semua segmen di dalam Sekretariat Daerah atau di luar Kota Binjai. Nantinya, diyakini bahwa materi E-budgeting dapat ditampilkan agar lebih rinci & jelas, maka langsung memastikan sekali lagi supaya menjamin itu layak atau tidak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin. (2016). Fungsi Humas Pemerintah Kota Binjai Dalam Penyebaran Kebijakan Publik. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan*, 17(2), 101–112.
- Andhayani, A., Malang, P. N., & Artikel, I. (2020). *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah : e-Budgeting untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. 4(9), 183–193.
- Khoirunnisak, R., Arishanti, D., & Vebrianti, D. D. (2017). Penerapan E-Budgeting Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mencapai Good Governance. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Ekonomi Dan Bisnis, 2017*, 249–250.  
<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/6715>
- Nasution, A. P., & Atika. (2019). Implementasi E-Budgeting sebagai Upaya Peningkatan Transparansi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 1–13.

<http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/454>

- Nugraha, A. Y., & Wibowo, U. B. (2020). *Managemen sistem informasi e-budgeting pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Yogyakarta*. 8(1), 70–80.
- Rafqi, I., Selviyanti, N. H., Halimah, S., & Eka, N. (2020). Efektivitas Impelmentasi e-Budgeting dalam Mewujudkan Good Governance dengan Model CIPP ( Study Kasus pada Kota Surabaya ). *Journal Of Islamic Economic Busines*, 1(2), 1–24.
- Sholikin, A., & Setiawan, A. (2018). *Journal of Islamic Finance and Accounting*. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 1(2), 35–50.  
<http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jifa>
- Soleh, A. N. (2019). Analisa Sistem Informasi E-Budgeting Pengajuan Rencana Anggaran Perusahaan menggunakan Balance Scorecard. *Sindimas*, 260–264.  
<https://www.stmikpontianak.ac.id/ojs/index.php/sindimas/article/view/580>
- Sudirman, M. Y. D., Kusuma, D. T., & Fitriani, Y. (2020). Pendekatan E-Budgeting Untuk Pemantauan Anggaran Perjalanan Dinas. *Petir*, 14(1), 52–60. <https://doi.org/10.33322/petir.v14i1.1021>
- Syahputri, I. M. (2021). Penggunaan Dana Desa dalam Perspektif Maqashid Syariah Studi di Desa Grogol , Kecamatan Tulangan , Kabupaten Sidoarjo tahun 2020. *Jae: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 6(2), 83–97.  
<https://doi.org/10.29407/jae.v6i2.16079>